

**Analisis Pembiayaan Pendidikan di SDN 106804 Percut Sei Tuan****Izaak Yohannes Bastian Usmany<sup>1</sup>, Eka Daryanto<sup>2</sup> Yuniarto Mudjisuusatyo<sup>3</sup>**<sup>1,2,3</sup> Administrasi Pendidikan, Pascasarjana Universitas Negeri Medan, Indonesia**Abstrak**

Pembiayaan pendidikan tidak hanya menyangkut analisis sumber-sumber dana saja, tetapi juga menyangkut penggunaan dana secara efektif dan efisien. biaya pendidikan meliputi biaya langsung (*direct cost*) dan biaya tidak langsung (*indirect cost*). Biaya langsung terdiri dari biaya-biaya yang dikeluarkan oleh pemerintah, masyarakat, dan orang tua siswa untuk keperluan pelaksanaan pengajaran dan kegiatan belajar siswa berupa pembelian alat-alat pelajaran, sarana belajar, biaya transportasi, gaji guru. Pembiayaan pendidikan memiliki sifat yang lebih kompleks daripada hanya menghitung biaya pada suatu unit produksi barang atau jasa. Penelitian ini dilakukan di SD Negeri 106804 Jl. Ciung Wanara No 425 Percut Sei Tuan. Adapun waktu penelitian dilaksanakan pada bulan Mei 2019. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dan menggunakan metode analisis deskriptif. Di SDN 106804 ada dua jenis pembiayaan pendidikan yaitu biaya operasional dan biaya investasi

**Kata Kunci:** biaya operasional; biaya investasi.**A. PENDAHULUAN**

Pendidikan merupakan faktor penting untuk mewujudkan sumber daya manusia (SDM) yang berkualitas. Pendidikan juga merupakan sarana strategis guna peningkatan mutu sumber daya manusia baik dalam pembangunan suatu bangsa maupun dalam tatanan global. Sumber daya manusia menjadi modal dasar sekaligus kekayaan suatu bangsa, sedangkan sumber-sumber modal dan materi merupakan faktor-faktor produksi yang hanya dapat diaktifkan oleh sumber daya manusia.

Salah satu unsur yang penting yang dimiliki oleh suatu sekolah agar menjadi sekolah yang dapat mencetak anak didik yang baik adalah dari segi pembiayaan. Manajemen biaya pendidikan sangat penting hubungannya dalam pelaksanaan kegiatan sekolah. Beragam sumber yang dimiliki oleh suatu sekolah, baik dari pemerintah maupun pihak lain. Ketika dana masyarakat atau dana pihak ketiga lainnya mengalir masuk, harus dipersiapkan sistem pengelolaan pembiayaan yang profesional dan jujur.

Sumber daya pendidikan yang dianggap penting adalah uang. Pendidikan tidak akan berjalan tanpa adanya biaya atau uang. Uang ini termasuk sumber daya yang langka dan terbatas. Sehingga, uang perlu dikelola dengan efektif dan efisien agar membantu pencapaian tujuan pendidikan. Pendidikan yang berkualitas merupakan suatu investasi yang mahal. Kesadaran masyarakat untuk menanggung biaya pendidikan pada hakekatnya akan memberikan suatu kekuatan pada masyarakat untuk bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan pendidikan.

Perkembangan dunia dalam bidang pendidikan dengan mudah dapat dikatakan bahwa masalah pembiayaan menjadi masalah yang cukup pelik untuk dipikirkan oleh para pengelola pendidikan. Masalah pembiayaan pendidikan akan menyangkut masalah tenaga pendidik, proses pembelajaran, sarana prasarana, pemasaran dan aspek lain yang terkait dengan masalah keuangan. Fungsi pembiayaan

tidak mungkin dipisahkan dari fungsi lainnya dalam pengelolaan sekolah.

Biaya Pendidikan menurut Suhardan (2012: 22) adalah total biaya yang dikeluarkan baik oleh individu peserta didik, keluarga yang menyekolahkan anak, warga masyarakat perorangan, kelompok masyarakat maupun yang dikeluarkan pemerintah untuk kelancaran pendidikan. Sedangkan menurut Matin (2014:4) menyatakan bahwa, pembiayaan pendidikan pada dasarnya merupakan suatu proses mengalokasikan sumber - sumber pada kegiatan-kegiatan atau program-program pelaksanaan operasional pendidikan atau dalam proses belajar mengajar dikelas.

Mulyono (2010:155) menyatakan bahwa biaya pendidikan bukan hanya berbentuk uang, melainkan juga dalam bentuk biaya kesempatan (opportunity cost) yang sering disebut *income forgone*, yaitu potensi pendapatan bagi seorang siswa selama ia mengikuti pelajaran atau menyelesaikan studi. Hal senada diungkapkan oleh E. Mulyasa (2011:168) yang menyatakan bahwa dana pendidikan tidak selalu identik dengan uang (*red cost*), tetapi segala sesuatu pengorbanan yang diberikan untuk setiap aktivitas dalam rangka mencapai tujuan penyelenggaraan pendidikan.

Berdasarkan teori-teori di atas dapat disimpulkan bahwa pembiayaan pendidikan itu proses pengeluaran berbentuk uang ataupun pengorbanan dalam rangka melaksanakan seluruh aktivitas- aktivitas program pelaksanaan pendidikan. Wijaya (2012:119) mengemukakan bahwa "biaya pendidikan merupakan harga dasar atau harga minimum jasa pendidikan yang dikenakan pada produk jasa pendidikan tertentu.

Menurut Mulyasa (2004: 48), biaya rutin adalah biaya yang langsung dikeluarkan dari tahun ke tahun, seperti gaji pegawai (guru dan non-guru), serta biaya operasional, biaya pemeliharaan gedung, fasilitas dan alat-alat pengajaran (barang-barang habis pakai). Sementara biaya pembangunan misalnya biaya pembelian

atau pengembangan tanah, pembangunan gedung, perbaikan atau rehab gedung, penambahan furniture, serta biaya atau pengeluaran lain untuk barang-barang yang tidak habis pakai.

Fattah (2000) menambahkan biaya dalam pendidikan meliputi biaya langsung (*direct cost*) dan biaya tidak langsung (*indirectcost*). Biaya langsung terdiri dari biaya-biaya yang dikeluarkan untuk keperluan pelaksanaan pengajaran dan kegiatan belajar siswa seperti pembelian alat-alat pembelajaran, penyediaan sarana pembelajaran, biaya transportasi, gaji guru, baik yang dikeluarkan pemerintah, orang tua maupun siswa sendiri. Sedangkan biaya tidak langsung berupa keuntungan yang hilang dalam bentuk biaya kesempatan yang hilang yang dikorbankan oleh siswa selama belajar, contohnya: uang jajan siswa, pembelian peralatan sekolah (pulpen, tas, buku tulis, dan lain-lain).

Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa pembiayaan menjadi masalah sentral dalam pengelolaan kegiatan pendidikan. Ketidakkampuan suatu lembaga untuk menyediakan biaya, akan menghambat proses belajar mengajar. Hambatan pada proses belajar mengajar dengan sendirinya menghilangkan kepercayaan masyarakat pada suatu lembaga. Namun, bukan berarti bahwa apabila tersedia biaya yang berlebihan akan menjamin bahwa pengelolaan sekolah akan lebih baik.

Pada tingkat sekolah (satuan pendidikan), pembiayaan pendidikan diperoleh dari subsidi pemerintah pusat, pemerintah daerah, iuran siswa, dan sumbangan masyarakat. Sejauh tercatat dalam Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah (RAPBS), sebagian besar biaya pendidikan di tingkat sekolah berasal dari pemerintah pusat, sedangkan pada sekolah swasta berasal dari para siswa atau yayasan.

Pengelolaan pembiayaan secara umum sebenarnya telah dilakukan dengan baik oleh semua sekolah. Hanya kadar substansi pelaksanaannya yang beragam

antara sekolah yang satu dengan yang lainnya. Adanya keragaman ini bergantung kepada besar kecilnya tiap sekolah, letak sekolah dan julukan sekolah. Pada sekolah-sekolah biasa yang daya dukung masyarakatnya masih tergolong rendah, manajemen pembiayaan pendidikan pun masih sederhana. Sedangkan, pada sekolah-sekolah biasa yang daya dukung masyarakatnya besar, tentu saja manajemen pembiayaan cenderung lebih rumit. Kecenderungan ini dilaku karena sekolah harus mampu menampung berbagai kegiatan yang semakin banyak dituntut oleh masyarakatnya.

Sekolah tidak terlepas dari manajemen pembiayaan karena dibutuhkan untuk operasional sekolah mulai dari penggajian tenaga pendidik, TU sampai menambah atau memperbaiki fasilitas sekolah guna meningkatkan kualitas dan kuantitas sekolah itu sendiri, dan untuk, membiayai kebutuhan sekolah yang lain. Pihak sekolah mengakui bahwa untuk menjalankan itu semua para orang tua diharapkan dapat berpartisipasi dalam melaksanakan tujuan sekolah yang dalam hal ini adalah masalah pembiayaan.

Terlebih di sekolah swasta, meskipun sudah mendapat dana BOS namun untuk menunjang operasional yang lain orang tua tetap memberikan dana tiap bulannya (SPP). Menurut Wijaya dalam jurnal penelitiannya yang berjudul "Implikasi Manajemen Keuangan Sekolah Terhadap Kualitas Pendidikan" menerangkan bahwa meskipun pemerintah telah memenuhi amanat konstitusi Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang alokasi APBN maupun APBD sebesar 20% untuk sektor pendidikan, tetapi dalam prakteknya sekolah swasta hanya mendapatkan porsi anggaran yang jauh lebih kecil daripada sekolah negeri. Selain itu, mekanisme penyaluran dana BOS bagi sekolah swasta dan sekolah negeri sangat berbeda.

Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih jauh tentang manajemen pembiayaan pendidikan sekolah. Sehingga dalam hal

ini, penulis mengajukan judul penelitian, yaitu "Analisis Manajemen Pembiayaan Pendidikan di SD Negeri 106804 Percut Sei Tuan

Berdasarkan latar belakang diatas maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: Bagaimanakah pelaksanaan pembiayaan pendidikan di SD Negeri 106804 Percut Sei Tuan.

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pelaksanaan manajemen pembiayaan di SD Negeri 106804 Percut Sei Tuan

Penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan kajian untuk mendalami dan mengembangkan konsep atau teori tentang manajemen pembiayaan pendidikan dan bahan acuan bagi para peneliti berikutnya, terutama yang berminat meneliti tentang hal-hal yang berkaitan dengan penganggaran, pengalokasian, pengawasan, dan pertanggungjawaban pembiayaan pendidikan di sekolah swasta. Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi sekolah khususnya yang berkaitan dengan manajemen pembiayaan pendidikan, pemanfaatan dana secara efisien dan mengalokasikannya secara tepat sesuai dengan skala prioritas sehingga mendukung kinerja yang efektif. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan dapat menambah pengetahuan tentang manajemen biaya pendidikan bagi pengelola satuan pendidikan dan pembuat kebijakan, pengelola sekolah mengelola dana pendidikan secara efisien dan efektif, dan pemerintah pusat dan daerah meningkatkan anggaran pendidikan guna peningkatan mutu pendidikan.

## B. KAJIAN PUSTAKA

### PENGERTIAN BIAYA PENDIDIKAN

Menurut Dadang Suhardan secara bahasa, biaya atau cost dapat diartikan sebagai pengeluaran dan di dalam istilah ekonomi biaya atau pengeluaran dapat berupa uang atau bentuk moneter lainnya. Pengertian biaya dalam ekonomi ialah pengorbanan - pengorbanan yang dinyatakan dalam

bentuk uang, dan diberikan secara rasional, melekat pada proses produksi dan tidak dapat dihindarkan. Bila tidak demikian maka pengeluaran tersebut dikategorikan sebagai pemborosan.

Lalu apa itu biaya pendidikan? Secara umum pembiayaan pendidikan adalah sebuah kompleksitas yang di dalamnya akan terdapat saling keterkaitan pada setiap komponennya, yang memiliki rentang yang bersifat mikrot hingga makro yang meliputi sumber - sumber biaya pendidikan, sistem dan mekanisme pengalokasiannya, efektivitas dan efisiensi dalam penggunaannya, akuntabilitas hasil yang dikuru dari perubahan-perubahan yang terjadi pada semua tataran, khususnya sekolah dan permasalahan - permasalahan yang masih terkait dengan pembiayaan pendidikan, sehingga diperlukan studi khusus untuk lebih spesifik mengenai pembiayaan pendidikan ini.

Pengertian Pembiayaan pendidikan menurut para ahli dikemukakan oleh Nanang Fattah yang mendefinisikan biaya dalam pendidikan meliputi biaya langsung (direct cost) dan biaya tidak langsung (indirect cost). Biaya langsung terdiri dari biaya yang dikeluarkan untuk keperluan pelaksanaan pengajaran dan kegiatan belajar siswa seperti membeli alat pembelajaran, penyediaan sarana pembelajaran, biaya transportasi, gaji guru. Sementara biaya tidak langsung berupa keuntungan yang hilang dalam bentuk biaya kesempatan yang hilang dan dikorbankan oleh siswa selama proses belajar. Contohnya, uang jajan siswa, pembelian peralatan sekolah (pulpen, buku tulis, tas, dll).

#### JENIS BIAYA PENDIDIKAN

Menurut Dadang Suhardan, jenis biaya pendidikan dapat di kategorikan ke dalam biaya langsung (direct cost), biaya tidak langsung (indirect cost), privat cos, social cost dan monetary cost.

##### 1. Biaya Langsung

Biaya pendidikan langsung merupakan biaya penyelenggaraan pendidikan yang

dikeluarkan oleh sekolah, siswa atau keluarga siswa. Biaya langsung ini lebih mudah dihitung karena diketahui oleh para wajib pajak dan data di sekolahpun tersedia, sementara biaya tidak langsung sulit dihitung.

Biaya langsung terwujud dalam bentuk pengeluaran uang yang secara langsung digunakan untuk membiayai penyelenggaraan PBM, penelitian dan pengabdian masyarakat, gaji guru dan pegawai, buku, bahan perlengkapan, dan biaya perawatan.

##### 2. Biaya Tidak Langsung (Indirect Cost)

Biaya tidak langsung (Indirect Cost) berbentuk biaya hidup yang dikeluarkan oleh keluarga atau anak yang belajar untuk keperluan sekolah, biaya ini dikeluarkan tidak langsung digunakan oleh lembaga pendidikan melainkan dikeluarkan oleh keluarga, anak atau orang yang menanggung biaya peserta didik yang mengikuti pendidikan. Biaya tidak langsung merupakan biaya hidup yang menunjang kelancaran pendidikannya. Misalnya: ongkos angkutan, biaya makan sehari-hari, biaya kesehatan.

##### 3. Private Cost

Private Cost merupakan keseluruhan biaya yang dikeluarkan keluarga atau segala biaya yang harus ditanggung dan dikeluarkan oleh keluarga anak untuk keberhasilan belajar anaknya. Misalnya: membayar guru les private supaya anaknya pandai bahasa inggris dan matematika, keluarga juga mengeluarkan uang tambahan supaya anaknya pandai komputer.

##### 4. Social Cost

Social Cost merupakan biaya yang dikeluarkan masyarakat baik perorangan maupun organisasi untuk membiayai segala keperluan belajar. Biaya ini adalah biaya yang dikeluarkan masyarakat sebagai wujud partisipasinya dalam penyelenggaraan pendidikan, karena pendidikan bukan hanya menjadi tanggungan pemerintah dan orangtua saja tetapi juga menjadi tanggung jawab

bersama, pemerintah, orangtua, dan masyarakat.

#### 5. Monetary Cost.

Monetary Cost. Selain pengeluaran dalam bentuk uang atau materi, ada juga biaya yang harus tidak dalam bentuk seperti itu, melainkan bentuk jasa, tenaga, dan waktu. Biaya semacam ini dapat diuangkan atau dinilai dan disetarakan kepada nilai uang. Biaya yang dikeluarkan untuk keperluan semacam ini disebut biaya moneter atau Monetary Cost.

Sumber – sumber Pembiayaan Pendidikan

Manajemen pembiayaan pendidikan mengkaji bagaimana pendidikan diperoleh dan dipergunakan. Manajemen pembiayaan pendidikan merupakan rangkaian aktivitas mengatur keuangan sekolah mulai dari perencanaan, pembukuan, pembelanjaan, pengawasan, dan pertanggungjawaban keuangan sekolah. Sama halnya Sekolah Dasar Negeri (SD), pada umumnya sekolah swasta memiliki sumber-sumber anggaran penerimaan, yang terdiri dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, masyarakat sekitar, serta orang tua murid.

Menurut UU No 20 Tahun 2003 Pasal 47 Tentang Sumber Pendanaan Pendidikan yaitu: ayat (1) Sumber pendanaan pendidikan ditentukan berdasarkan prinsip keadilan, kecukupan, dan keberlanjutan. Ayat (2) Pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat mengerahkan sumber daya yang ada sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Ayat (3) Ketentuan mengenai sumber pendanaan pendidikan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan (2) diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah.

#### 1) Pembiayaan pendidikan dari Pemerintah Pusat

Sistem pendidikan di Indonesia memperlihatkan bahwa biaya sekolah masih dibebankan sebagian besar kepada pemerintah. Karena itu, jumlah anggaran pendidikan di tengah

perkembangan ekonomi kita yang kurang baik sangatlah minim, terlebih lagi kurang seriusnya pemerintah dalam mencurahkan perhatiannya terhadap pendidikan yang belum memandangnya sebagai sektor ekonomi prioritas. Kebijakan yang ditempuh pemerintah dalam mengatasi minimnya dana pendidikan kita adalah dengan membolehkan sekolah-sekolah negeri menggalang dana dari masyarakat, yang berasal dari orang tua atau berupa sumbangan dari masyarakat dan dunia usaha lainnya. Hal ini ditempuh karena anggaran untuk pengembangan sekolah dirasakan kurang memadai, untuk menutupi kebutuhan sekolah. Kebijakan di daerah-daerah juga masih kurang merespons sepenuhnya kebijakan nasional dalam pendidikan, ditambah kondisi sebagian daerah lagi sumber dana alamnya tidak mendukung atau karena kemampuan keuangan APBD tidak mendukung terhadap perkembangan pembangunan daerahnya sendiri dan juga diakibatkan faktor-faktor lainnya.

Matin menjelaskan bahwa sumber dana dari pemerintah pusat adalah berasal dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) baik untuk membiayai kegiatan rutin yang tercantum dalam Daftar Isian Kegiatan (DIK) maupun untuk membiayai kegiatan pembangunan yang tercantum dalam Daftar Isian Proyek (DIP). Disamping itu, pada tingkat sekolah terdapat dana dari pemerintah pusat berupa Biaya Operasional Sekolah (BOS) yang jumlahnya ditentukan oleh karakteristik siswa dan jenjang sekolah. Sumber dana dari pemerintah daerah adalah berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) baik APBD Provinsi maupun Tingkat Kabupaten/Kota. Dana dari APBD digunakan untuk mendukung kegiatan-kegiatan bidang pendidikan yang ada di daerah yang bersangkutan baik untuk kegiatan rutin maupun kegiatan pembangunan. Dana dari pemerintah daerah diwujudkan berupa Biaya Operasional Pendidikan (BOP) yang jumlahnya ditentukan

berdasarkan kesanggupan keuangan pemerintah daerah bersangkutan.

## 2) Pembiayaan Pendidikan dari Orang Tua Siswa

Matin juga menguraikan jenis-jenis pembiayaan pendidikan yang berasal dari orang tua siswa antara lain:

### 1. Sumbangan Pembinaan Pendidikan (SPP)

SPP adalah kewajiban orang tua dalam membiayai penyelenggaraan pendidikan anak-anaknya yang dibayar berdasarkan ketentuan yang sudah ditetapkan dan diatur oleh yayasan atau penyelenggaraan pendidikan untuk sekolah/madrasah swasta.

### 2. Sumbangan Badan Pembantu Penyelenggaraan Pendidikan (SBP3)

BP3 adalah organisasi persatuan orang tua siswa atau Persatuan Orang Tua Murid dan Guru (PMOG) yang diharapkan dapat membantu penyelenggaraan pendidikan bagi sekolah/madrasah.

### 3. Sumbangan Lain-lain

Selain kedua jenis biaya diatas, ada juga sumbangan dari orang tua siswa yang bersifat incidental, baik berupa uang maupun barang misalnya biaya praktikum, keterampilan, kegiatan ekstra kurikuler, peralatan laboratorium, pembangunan pagar sekolah, peralatan pelajaran dan lain-lain.

## 3) Sumbangan Dari Pihak Lain

Matin menjelaskan bahwa sumbangan dana dari masyarakat lain diluar penyelenggaraan dan orang tua siswa dapat berupa sumbangan yang tidak mengikat baik dari perseorangan maupun dari yayasan-yayasan atau perusahaan-perusahaan yang ada di dalam maupun di luar negeri yang mempunyai perhatian besar dan berkepentingan terhadap pengembangan bidang pendidikan dan kebudayaan. Sumber dana bantuan dari luar negeri adalah berupa pinjaman (loan) dan hibah (grant) dari negara-negara asing atau dari badan-badan yang berada di luar negeri yang digunakan untuk membantuk menunjang perwujudan pelaksanaan

program-program pembangunan pendidikan di indonesia khususnya untuk kelancaran pelaksanaan program pendidikan yang diselenggarakan oleh swasta (sekolah swasta).

Dalam Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2012 tentang pengutan dan Sumbangan Biaya Pendidikan Pada Satuan Pendidikan Dasar Pasal 12 ayat (1) masyarakat diluar penyelenggara dan satuan pendidikan dasar yang didirikan masyarakat, serta peserta didik atau orang tua/walinya dapat memberikan sumbangan pendidikan kepada satuan pendidikan dasar, (2) Satuan pendidikan dasar dapat menerima sumbangan, (3) Sumbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan untuk memenuhi kekurangan biaya satuan pendidikan.

## KOMPONEN BIAYA PENDIDIKAN

Secara umum setidaknya terdapat 19 (sembilan belas) komponen biaya pendidikan, meliputi:

1. Peningkatan KBM
2. Pembinaan tenaga kependidikan
3. Pengadaan alat - alat pembelajaran
4. Pengadaan bahan pelajaran
5. Sarana Kelas
6. Sarana sekolah
7. Pembinaan Siswa
8. Pengelolaan sekolah
9. Pemeliharaan dan penggantian sarana dan prasarana pendidikan
10. Biaya pembinaan, pengawasan dan pelaporan
11. Peningkatan mutu pada semua jenis dan jenjang pendidikan
12. Peningkatan kemampuan dalam menguasai IPTEK
13. Peningkatan pembinaan kegiatan siswa
14. Rumah tangga sekolah
15. Kesejahteraan
16. Perawatan
17. Pengadaan alat - alat belajar
18. Pembinaan tenaga kependidikan
19. Pengadaan bahan pelajaran

## CARA-CARA MEMPERKIRAKAN BIAYA PENDIDIKAN

Terdapat dua cara untuk memperkirakan biaya pendidikan, yaitu (1) memperkirakan biaya atas dasar sumber-sumber pembiayaan, dan (2) memperkirakan biaya atas dasar laporan dari lembaga-lembaga pendidikan.

Cara yang pertama dilakukan dengan cara meneliti laporan dari sumber-sumber pembiayaan pendidikan. Menurut sifatnya sumber-sumber ini dibedakan atas: (1) pengeluaran yang menyeluruh, dan (2) pengeluaran menurut status, tingkat, dan sifatnya.

Pengeluaran menyeluruh terdiri atas: (a) sumber-sumber pemerintah, yang terdiri atas: (1) pemerintah pusat, (2) pemerintah daerah, dan (3) bantuan luar negeri.

Pengeluaran menurut status dan sifatnya; Menurut statusnya pengeluaran dibedakan atas pengeluaran dari lembaga pendidikan pemerintah dan pengeluaran pendidikan swasta. Kemudian menurut tingkatnya, yaitu TK, SD, SLTP, SLTA (SMU dan SMK), dan perguruan tinggi. Selanjutnya menurut sifatnya: pengeluaran dibedakan atas pengeluaran berulang, pengeluaran modal, dan pengeluaran lainnya.

Cara yang kedua, ialah menggunakan secara langsung laporan dari lembaga-lembaga pendidikan. Untuk keperluan membuat perkiraan tersebut harus dipenuhi syarat-syarat sebagai berikut: Yang pertama, dan yang terpenting adalah harus ada laporan dari lembaga-lembaga pendidikan. Kedua, laporan tersebut harus dibuat menurut pola standar fungsional yang seragam. Ketiga, laporan harus memperlihatkan keseluruhan biaya operasi dari lembaga tersebut.

Sumber-sumber dana pendidikan antara lain meliputi: Anggaran rutin (DIK); Anggaran pembangunan (DIP); Dana Penunjang Pendidikan (DPP); Dana BP3; Donatur; dan lain-lain yang dianggap sah oleh semua pihak yang terkait. Pendanaan pendidikan pada dasarnya bersumber dari pemerintah, orang tua dan masyarakat (pasal 33 No. 2 tahun 1989). Sejalan dengan adanya Manajemen Berbasis Sekolah (MBS), sekolah dapat menggali

dan mencari sumber-sumber dana dari pihak masyarakat, baik secara perorangan maupun secara lembaga, baik di dalam maupun di luar negeri, sejalan dengan semangat globalisasi.

Dana yang diperoleh dari berbagai sumber itu perlu digunakan untuk kepentingan sekolah, khususnya kegiatan belajar mengajar secara efektif dan efisien. Sehubungan dengan itu, setiap perolehan dana, pengeluarannya harus didasarkan pada kebutuhan-kebutuhan yang telah disesuaikan dengan rencana anggaran pembiayaan sekolah (RAPBS).

Anwar (2013) menyatakan bahwa berperannya pendidikan baik sebagai subjek maupun objek pendidikan tidak terlepas dari adanya sejumlah kegiatan yang dilaksanakan untuk mencapai tujuan yang dikehendaki. Dalam proses pelaksanaan kegiatan ini muncullah pembiayaan pendidikan. Pengelolaan pembiayaan pendidikan mempunyai manfaat yang cukup besar bagi kelangsungan pembelajaran di sekolah. Pengelolaan pembiayaan pendidikan bersumber dari partisipasi masyarakat untuk meningkatkan jalannya rodpendidikan, tanpa partisipasi masyarakat, maka pendidikan tidak akan berjalan dengan baik” (Muhajirin, 2012). Menurut Muhajirin (2012), “biaya pendidikan merupakan salah satu faktor pendukung (sumber daya pendidikan) yang sangat penting dalam penyelenggaraan pendidikan di sekolah. Dalam upaya pencapaian tujuan, biaya pendidikan memiliki peranan yang sangat menentukan untuk kelangsungan pendidikan”.

#### TUJUAN ANALISIS MANFAAT BIAYA

Setelah memahami bentuk biaya, tujuan dari analisis biaya adalah untuk memberikan kemudahan, memberikan informasi pada para pengambil keputusan untuk menentukan langkah/cara dalam pembuatan kebijakan sekolah, guna mencapai efektivitas maupun efisiensi

pengolahan dana pendidikan serta peningkatan mutu pendidikan.

Secara khusus, analisis manfaat biaya pendidikan bagi pemerintah menjadi acuan untuk menetapkan anggaran pendidikan dalam RAPBN, dan juga sebagai dasar untuk meningkatkan kualitas SDM dengan meningkatkan mutu pendidikan nasional. Sedangkan bagi masyarakat, analisis manfaat biaya pendidikan ini berguna sebagai dasar/pijakan dalam melakukan "investasi" di dunia pendidikan. Hal ini dirasakan penting untuk diketahui dan dipelajari, karena menurut sebagian masyarakat pendidikan hanya menghabiskan uang tanpa ada jaminan/prospek peningkatan hidup yang jelas dimasa yang akan datang.

### C. METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan di SD Negeri 106804 Jalan Ciung Wanara No 425 Percut Sei Tuan Adapun waktu penelitian dilaksanakan 03 Mei 2019.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dan menggunakan metode analisis deskriptif. Metode analisis deskriptif dilakukan untuk memaparkan perhitungan biaya satuan per siswa per program keahlian.

Sumber data adalah subjek dari mana data dapat diperoleh yaitu, Person sumber data yang bisa memberikan data berupa jawaban tertulis melalui angket, Adapun sumber data yang berupa person dalam penelitian ini yakni Kepala Sekolah, Tata Usaha.

Populasi dalam penelitian ini adalah kepala sekolah, Tata Usaha. Dalam penelitian kualitatif menggunakan non-probabilitas sampling dengan menggunakan teknik purposive sampling, yaitu menentukan sampel dengan pertimbangan tertentu yang dipandang dapat memberikan data secara maksimal. Adapun sampel dalam penelitian ini yakni kepala sekolah, Tata Usaha.

### D. HASIL PENELITIAN

SDN 106804 merupakan salah satu sekolah dasar di Percut Sei Tuan. Hasil penelitian tentang pembiayaan pendidikan di SDN 106804 Percut Sei Tuan, baik biaya Operasional maupun biaya investasi. Berdasarkan Hasil pengumpulan data yang menggunakan angket dan juga melalui percakapan dengan kepala sekolah SDN 106804 Ibu Delpi Yetti Manalu, S.Pd peneliti menyimpulkan bahwa pembiayaan pendidikan di SDN 106804 meliputi dua bagian yaitu biaya operasional dan biaya investasi.

Biaya Operasional di SDN 106804 meliputi:

1. Biaya kesejahteraan pendidik: Insentif tambahan bagi guru PNS/GTY dari Pemda Kab./Kota per orang per bulan sebesar sebulan gaji, Insentif tambahan bagi tenaga administrasi di sekolah dari Pemda Kab./Kota per orang per bulan Rp 500.000,- Hadiah hari raya dari sekolah untuk guru (per orang) sebesar sebulan gaji. Hadiah hari raya dari sekolah untuk tenaga administrasi sebesar Rp 150.000,- Biaya yang dialokasikan dari sekolah untuk pakaian seragam guru per orang Rp 150.000,-, Biaya yang dialokasikan dari sekolah untuk pakaian seragam tenaga administrasi per orang Rp 200.000,- Total: Rp 1.000.000,-

2. Peningkatan Profesi/Diklat: Biaya sekolah untuk pelaksanaan kegiatan KKG/MGMP per guru per tahun: Rp 300.000,- per semester, Biaya sekolah untuk pelaksanaan kegiatan MKKS per tahun Rp 300.000 per bulan. Total: Rp 600.000,-

3. Penyelenggaraan KBM: Biaya sekolah untuk penyediaan buku bahan ajar per siswa per tahun Rp 150.000.000,- per tahun, Biaya sekolah untuk penyediaan bahan praktikum IPA per siswa pertahun: Rp 20.000.000,- per tahun, Biaya sekolah untuk penyediaan bahan praktik IPS persiswa pertahun Rp 1.000.000,- per tahun, Biaya sekolah untuk penyediaan

bahan praktik keterampilan persiswa per tahun: Rp 500.000,- Biaya sekolah untuk pengembangan kurikulum muatan lokal dan pengembangan diri (satu kali per tahun): Rp 500.000,-, Pembelian alat tulis kantor: Rp 2.800.000,- per triwulan. Total: Rp 174.800.000,-

4. Penilaian: Biaya sekolah untuk ulangan umum (teori) persiswa pertahun: Rp 12.000.000,- untuk 2 semester, Biaya khusus untuk pembelian buku raport per siswa: 286 Siswa x Rp 58.000,- = Rp 16.588.000,- Total: Rp 28.588.000,-

5. Pemeliharaan Dan Penggantian: Biaya sekolah untuk perawatan bangunan sekolah per tahun sumbernya dari dana bos, Biaya sekolah untuk perawatan perabot kantor per tahun: Rp 10.000.000,-, Biaya sekolah untuk penggantian alat keterampilan yang rusak per tahun: Rp 2.000.000,-, Biaya sekolah untuk penggantian buku pelajaran yang rusak pertahun: Rp 80.000.000,-, Rehap tempat ibadah: Rp 20.000.000,-, Pembangunan fasilitas olahraga: Rp 1.200.000,-, Pembangunan ruang perpustakaan: Rp 6.000.000,-, Total: Rp 119.200.000,-

6. Kesiswaan: Biaya sekolah untuk pembinaan pramuka tingkat sekolah: Rp 300.000,-, Biaya sekolah untuk pembinaan olahraga tingkat sekolah: Rp 300.000,-, Biaya sekolah untuk pembinaan kesenian tingkat sekolah: Rp 300.000,-, Biaya sekolah untuk pelaksanaan Porseni tingkat sekolah: Rp 300.000,-, Biaya sekolah untuk pelaksanaan Cerdas Cermat tingkat sekolah: Rp 300.000,-, Biaya sekolah untuk pelaksanaan Olimpiade sains tingkat sekolah: Rp 300.000,-, Biaya pembinaan KIR per tahun: Gratis, Biaya untuk penyelenggaraan Peringatan hari raya besar per tahun: Rp 3.000.000,-, Biaya sekolah untuk kegiatan Pesantren kilat per siswa: Rp 50.000,-, Biaya sekolah untuk kegiatan orientasi siswa baru: Rp 250.000,-, Beasiswa dari Depdiknas per siswa per tahun (BOS Pusat): Rp 800.000,- per siswa. Total: Rp 3.200.000,-

Biaya Investasi di SDN 106804 meliputi:

1. Sarana prasarana:  
Bangunan: Biaya untuk pembangunan ruang kelas baru: Rp 150.000.000,-, Biaya untuk pembangunan ruang Tata Usaha: Rp 50.000.000,-, Biaya untuk pembangunan ruang Kepala Sekolah: Rp 50.000.000,-, Biaya untuk pembangunan ruang Ibadah: Rp 100.000.000,-, Biaya untuk pembangunan kamar kecil /WC: Rp 50.000.000,-, Total: Rp 400.000.000,-
2. Buku: Biaya untuk pembelian buku Teks Utama per tahun, Biaya untuk pembelian buku Perpustakaan per tahun, Biaya untuk pembelian buku Sumber per tahun, Biaya untuk pembelian buku Pelengkap per tahun: total keseluruhan: Rp 80.000.000,-, Total: Rp 80.000.000,-
3. Komponen pembiayaan: Biaya untuk pembelian Komputer: 4 tahun sekali, Biaya untuk pembelian Perabot per tahun: Rp 3.200.000,-, Total: Rp 3.200.000,-

#### E. PEMBAHASAN

Sekolah sebagai salah satu tempat penyelenggaraan kegiatan belajar mengajar secara formal tentunya ingin menyelenggarakan pendidikan yang baik dan berkualitas, begitu pula dengan SDN 106804 Percut Sei Tuan. Dana pendidikan merupakan sumber daya keuangan yang disediakan untuk menyelenggarakan dan mengelola pendidikan. Dana pendidikan dibutuhkan untuk membiayai operasional sekolah mulai dari Kesejahteraan Tenaga Pendidik Dan Kependidikan, (b) Peningkatan profesi.

Pengertian Pembiayaan pendidikan menurut para ahli dikemukakan oleh Nanang Fattah yang mendefinisikan biaya dalam pendidikan meliputi biaya langsung (direct cost) dan biaya tidak langsung (indirect cost). Biaya langsung terdiri dari biaya yang dikeluarkan untuk keperluan pelaksanaan pengajaran dan kegiatan belajar siswa seperti membeli alat pembelajaran, penyediaan sarana pembelajaran, biaya transportasi, gaji guru. Biaya operasional di SDN 106804 Percut Sei Tuan dengan jumlah RP 327.388.000,-. Biaya investasi sekolah (BIS) merupakan

biaya yang dikeluarkan untuk komponen sarana prasarana. Biaya investasi pembiayaan pendidikan sangat tinggi dengan jumlah RP. 483.200.000,-. Biaya terbesar BIS dialokasikan untuk biaya sarana prasarana berupa Biaya untuk pembangunan ruang kelas baru, Biaya untuk pembangunan ruang Perpustakaan, Biaya untuk pembangunan Laboratorium Bahasa. Biaya investasi merupakan biaya yang dikeluarkan dalam kurun waktu lebih dari satu tahun. Artinya biaya ini dikeluarkan dalam kurun waktu lebih dari satu tahun, mungkin dua tahun, lima tahun, atau bahkan sepuluh tahun.

#### F. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasannya, maka dapat diambil suatu kesimpulan bahwa biaya personal yang dikeluarkan orangtua SDN 106804 cukup rendah per/tahunnya, dan Biaya investasi terdiri dari biaya sarana dan prasarana, dan tenaga. Biaya sarana dan prasarana terdiri dari biaya untuk lahan, bangunan, buku, dan alat-alat pembelajaran. Pemenuhan biaya operasional dan investasi sekolah SDN 106804 saat ini ditanggung dari dana BOS.

Matin menjelaskan bahwa sumber dana dari pemerintah pusat adalah berasal dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) baik untuk membiayai kegiatan rutin yang tercantum dalam Daftar Isian Kegiatan (DIK) maupun untuk membiayai kegiatan pembangunan yang tercantum dalam Daftar Isian Proyek (DIP). Disamping itu, pada tingkat sekolah terdapat dana dari pemerintah pusat berupa Biaya Operasional Sekolah (BOS) yang jumlahnya ditentukan oleh karakteristik siswa dan jenjang sekolah

#### DAFTAR PUSTAKA

Anwar, I. (2013). *Administrasi Pendidikan dan Manajemen Biaya Pendidikan*. Bandung: Alfabeta.

Fattah ., Nanang. (2012) . *Ekonomi & Pembiayaan Pendidikan*. Bandung: PT.Rosda Karya.

Matin. (2014) . *Manajemen Pembiayaan Pendidikan Konsep dan Aplikasinya*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Muhajirin. (2012). *Pengelolaan Pembiayaan Pendidikan Bersumber dari Partisipasi Masyarakat*. *Jurnal Educational Management*,1(2), 171.

Mulyasa, E. (2004). *Manajemen Berbasis Sekolah*. Bandung: Rosda

Permana, J., dkk. (2009). *Model Peta Pembiayaan Pendidikan Kab./Kota Dalam Konteks Otonomi Daerah*. *Artikel Penelitian*. November 2009

Supriadi, D. (2004) *Satuan Pendidikan Dasar Dan Menengah: Rujukan Bagi Penetapan Kebijakan Pembiayaan Pendidikan Pada Era Manajemen Dan Ekonomi Berbasis Sekolah*. Bandung: Rosdakarya

Supriadi, D. (2006). *Satuan Biaya Pendidikan Dasar dan Menengah*. Bandung: Rosdakarya

Suhardan D. (2012). *Ekonomi Dan Pembiayaan Pendidikan*. Bandung: Alfabeta

Judul dan nama Jurnal